



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
UNIT KERJA : DINAS PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HJ. SRI SULSILAWATI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 491090

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.866.190.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 190.196.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/256 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 677.392.000
3. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA ENREKANG, HASIL SENDIRI Rp. 14.400.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/384 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 880.392.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.128.560.000
8. Bangunan Seluas 45 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
9. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 19.985 m2/128 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 1.255.250.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	524.000.000
1. MOBIL, HONDA CRV - Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	
150.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX (2DP) - Tahun 2015, HASIL SENDIRI		
Rp. 24.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI	Rp.	
350.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	239.650.500
D. SURAT BERHARGA	Rp.	501.324.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	816.699.177
F. HARTA LAINNYA	Rp.	30.708.950
Sub Total	Rp.	6.978.572.627
III. HUTANG	Rp.	99.840.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.878.732.627

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.